

## ***Collaborative governance dalam Penanggulangan Banjir di Kota Dumai***

**Khairunsyah Purba<sup>(1)</sup>, Nelvi Rahmadani<sup>(2)</sup>**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau<sup>(1)</sup>  
Panam, Jl. HR. Soebrantas No.Km. 15, RW.15, Simpang Baru, Kota Pekanbaru, Riau 28293.  
Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial<sup>(2)</sup>  
Jl. Kapten Suparman No.39, Potrobangsang, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah  
56116.

Email: [khairunsyah.purba@uin-suska.ac.id](mailto:khairunsyah.purba@uin-suska.ac.id)<sup>(1)</sup>, [nelvi.rahmadani25@gmail.com](mailto:nelvi.rahmadani25@gmail.com)<sup>(2)</sup>

Dikirim: 4 November 2023, Direvisi: 6 Januari 2024, Diterima: 19 Januari 2024, Tersedia Online: 31 Januari 2024

### **ABSTRACT:**

### **Keywords:**

*Flood;*  
*Collaborative*  
*Governance;*  
*Countermeasures.*

*Flood management in Dumai City is still not optimal so the intensity of the flooding that occurs is still quite high. On the other hand, flooding is a quite serious phenomenon and can cause impacts such as hampering community activities, causing economic losses both individually and generally, health problems and sometimes loss of life, and can damage the environment. The aim of this research is to determine government collaboration in dealing with floods that occurred in Dumai City. This research uses a literature review method. The informants in this research were the Dumai City Public Works and Spatial Planning Service, the Dumai City Regional Disaster Management Agency, the Dumai City Environmental Service, and the Riau Natural Resources Conservation Center. The results of this research show that through face-to-face dialogue with several meetings and long discussions, stakeholders are aware of the limitations of their authority, resulting in a division of tasks that can be carried out by each stakeholder. These main tasks and functions are stated in the signing of the cooperation agreement so that stakeholders focus on carrying out their own obligations to achieve effectiveness in flood management in Dumai City. On the other hand, there are still stakeholders who are incompetent in the collaboration process due to changes in positions so that the human resources owned by the agency do not know exactly what tasks they have to carry out. This causes delays in information being received by stakeholders, thereby hampering the coordination process in collaborating on flood management in Dumai City.*

### **PENDAHULUAN**

Salah satu bencana hidrometologi yang cukup sering terjadi di Indonesia adalah fenomena banjir (Satria et al., 2018). Kondisi dari banjir ini adalah tergenangnya suatu daerah akibat datangnya volume air dalam jumlah yang besar (Marchezini et al., 2022). Sebagai negara yang mengalami dua musim yaitu musim panas dan musim penghujan membuat banjir tidak menjadi

sesuatu yang mengherankan lagi bagi masyarakat Indonesia (Hartono, 2016). Rawannya kejadian banjir di Indonesia tentunya tidak terlepas dari kondisi geografis dimana hampir 30% dari 500 sungai di Indonesia mengalir di daerah yang ramai akan penduduk. Dihimpun dari Data BNPB menunjukkan bahwa 63,7 juta penduduk menempati kawasan yang sering terkena bencana banjir.

Biasanya kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air (Hermawan et al., 2019). Selanjutnya banjir dapat timbul karena dipengaruhi oleh dua faktor (Pradika et al., 2018). Pertama, banjir terjadi karena dipengaruhi oleh faktor alam seperti curah hujan yang tinggi, atau pasang surut air laut (Pahleviannur, 2019). Kedua, banjir juga timbul karena faktor non alam seperti pendirian bangunan disepanjang bantaran laut, serta kelalaian manusia dalam menjaga lingkungan sehingga menyebabkan saluran drainase untuk aliran sungai/laut menjadi tidak lancar karena terhambat oleh sampah, (Maghfur, 2017). Selain itu kurangnya pembuatan kebijakan yang baik dalam upaya pengentasan dan penanggulangan permasalahan banjir juga memberikan ruang kepada banjir untuk melanda berbagai kawasan yang ada di Indonesia (Utama et al., 2020).

Bencana banjir akan memunculkan banyak kerugian baik secara individu ataupun sosial apabila tidak ditangani dengan sungguh-sungguh (Findayangi, 2015) (Philia et al., 2023). Dalam jangka pendek banjir mengakibatkan terhambatnya aktivitas masyarakat di berbagai sektor untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari seperti terhambatnya kegiatan perkantoran dan jual beli (Skouloudis et al., 2023). Banjir juga membuat beberapa benda penting seperti dokumen, barang-barang berharga, rumah, dan fasilitas umum menjadi rusak akibat terkena genangan air. Disisi lain, banjir juga menyukarkan perolehan air bersih serta dapat memunculkan masalah kesehatan seperti penyakit diare, infeksi saluran pernafasan bahkan dapat menelan korban jiwa (Rahmat et al., 2021). Kemudian apabila banjir terus menerus terjadi maka dapat menyertakan dampak jangka panjang seperti perubahan iklim, urbanisasi dan pembangunan yang tidak terkendali dan tata kelola sosial-ekonomi yang lemah. Akibat perubahan lingkungan, seperti perubahan iklim dan penurunan tanah, serta perubahan sosial ekonomi yang dinamis di masa depan, diperkirakan ancaman banjir akan lebih besar dari pada yang dirasakan seperti sekarang ini (Rahayu et al., 2020).

Selanjutnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau, mengklasifikasikan bahwa Dumai termasuk satu dari tiga daerah yang cukup sering terkena banjir. Dumai masih

menjadi kota yang sering terkena banjir karena letaknya yang berada di Kawasan pesisir Timur Pulau Sumatera dan sebagian besar wilayahnya berada di dataran rendah yakni sekitar 3 meter diatas permukaan laut (Sihaloho, 2022). Penyebab lain Dumai masih sering dilanda banjir adalah karena pengaruh air pasang dari sungai-sungai yang ada di Kota Dumai. Di wilayah Kota Dumai terdapat 53 buah sungai yang dapat dilayari oleh kapal pompong, sampan, dan perahu sampai jauh ke daerah hulu sungai. Apabila air sungai tersebut meluap maka akan terjadi banjir (remaining on board) atau masyarakat dumai biasa menyebutnya dengan *pasang keling*. Kondisi tersebut akan semakin buruk apabila curah hujan tinggi. Adapun banjir yang biasanya terjadi akibat air hujan luas genangannya mencapai 436 ha, sementara titik banjir yang terjadi akibat pasang surut air laut/pantai berjumlah 415 ha.

Sejauh ini sebenarnya sudah ada upaya dalam penanganan masalah banjir mengingat dengan identitas Kota Dumai yang dikenal sebagai kota minyak, kota singgah dan kota industri yang maju sehingga menyebabkan pesatnya aktivitas baik dari luar daerah maupun dari masyarakat Kota Dumai itu sendiri. Adapun usaha yang dilakukan diantaranya melakukan normalisasi di beberapa sungai yang ada di Kota Dumai oleh pihak pemerintah seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang bekerja sama dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera III, serta juga dilakukan oleh pihak swasta seperti PT. Pelindo 1 dan Pertamina Dumai. Pemerintah Kota Dumai juga membangun drainase di sekitaran garis pantai. Kemudian Pemerintah Kota Dumai juga meghimbau untuk melakukan sistem tebang pilih dan penghijauan kembali, pembuatan hutan mangrove/bakau, serta tidak membangun rumah di kawasan pinggir sungai. Wujud keseriusan dan komitmen Pemerintah Kota Dumai dalam penanganan banjir juga hadir dengan meluncurkan Aplikasi KHIDMAT Bergerak Penanggulangan Banjir (BERGULIR) oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Dumai melalui Bidang Sumber Daya Air (SDA). Dengan menggunakan *smartphone* masyarakat dapat segera memberi informasi terkait banjir dan Pemko Dumai dapat memberikan penanganan banjir secara cepat, tepat sasaran, efektif dan efisien.

Dalam waktu singkat banjir dapat berkurang dengan cepat baik dari segi waktu genangan, luas genangan, serta tinggi genangan (Satria et al., 2018). Akan tetapi upaya tersebut masih belum membawa hasil yang signifikan karena banjir masih terus terjadi. Banjir di Kota Dumai

dapat membuat barang-barang berharga, rumah, dan fasilitas umum dapat rusak akibat terkena genangan air. Banjir juga menghambat sektor perdagangan karena kurangnya kegiatan jual beli yang mempengaruhi omset penjualan serta pendapatan masyarakat. Di sisi lain banjir dapat menggagu kesehatan yang terkadang menelan korba jiwa. Penyakit diare dan gatal gatal biasanya menyerang semua usia mulai dari balita, anak anak, remaja, dewasa bahkan lansia.

Melihat banyaknya dampak negatif yang akan dirasakan masyarakat akibat kejadian banjir tersebut maka ini menjadi suatu pengingat bagi Pemerintah Kota Dumai untuk selalu memberikan perhatian khusus terhadap fenomena banjir. Disamping itu Pemerintah Kota Dumai diharapkan dapat menyediakan sumber daya yang berkapasitas tinggi untuk mampu menghadapi fenomena banjir serta menyegerakan penanggulangan terhadap fenomena tersebut. Dengan demikian mengenai penanggulangan banjir di Kota Dumai perlu adanya sinergitas dengan setiap *stakeholder* seperti pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta atau pihak lain yang sekiranya dapat mengemban peran dalam proses penanggulangan banjir di Kota Dumai. Dengan adanya tatanan kolaborasi dalam penanggulangan banjir membuka peluang besar untuk mencapai keberhasilan penanggulangan banjir apabila didukung dengan adanya peran dan tanggung jawab yang aktif sebagaimana potensi dari para aktor.

Menurut Schrage dalam (Harley & Bissman, 2010) kolaborasi menjadi wadah untuk menyatukan setiap pihak yang mempunyai tujuan yang sama. Selanjutnya proses kolaboratif memerlukan keterlibatan berbagai pihak baik individu maupun organisasi yang saling bergandengan untuk melaksanakan tanggung jawab yang mereka dapat untuk mencapai tujuan bersama (Bima et al., 2021). Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2011) menjelaskan bahwa *collaborative governance* adalah suatu proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tataran pemerintahan (lembaga publik), institusi swasta maupun masyarakat sipil, dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila dilaksanakan oleh satu pihak saja. Adanya interdependensi antaraktor maupun antar organisasi membuat kolaborasi menjadi sangat dibutuhkan. Semakin besar interdependensi tersebut, baik secara tingkatan merata maupun dilihat dari bagan keatas, maka akan semakin besar kebutuhan untuk melakukan kolaborasi. *Collaborative governance* menjadi cara yang diharapkan

memberikan sifat mudah namun kompleks antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mengambil kesepakatan yang sama sehingga dapat menghasilkan titik temu yang paling efektif.

Daniel Seigler menyampaikan delapan prinsip utama dalam penerapan *collaborative governance* yakni: (1) warga masyarakat harus dilibatkan dalam produksi barang publik; (2) masyarakat harus mampu memobilisasi sumber daya dan aset untuk memecahkan masalah publik; (3) tenaga profesional harus dilibatkan untuk memberdayakan warga masyarakat; (4) pengambilan kebijakan harus dilakukan dengan musyawarah; (5) kebijakan harus mengandung kemitraan kolaboratif yang berkelanjutan; (6) kebijakan harus strategis; (7) kebijakan harus mengubah kelembagaan untuk pemberdayaan masyarakat dan pemecahan masalah publik; dan (8) kebijakan harus mengandung akuntabilitas (Seigler, 2011).

Ada sekian banyak model *collaborative governance* sebagai suatu metode kerja untuk menganalisa terjadinya kolaborasi antar-*stakeholders*. Salah satunya adalah model *Collaborative Governance Regime* (CGR) yang digagas oleh Kirk Emerson, Tina Nabatchi, dan Stephan Balogh (2011). Model CGR dinilai secara sangat sederhana namun detail dan mendalam untuk melihat proses kolaborasi dari input, driver hingga dampaknya. Kerangka kerja CGR mengintegrasikan banyak komponen tata kelola kolaboratif, mulai dari dinamika kolaborasi, tindakan dalam kolaborasi, serta hasil dan tindakan Model CGR memandang bahwa proses kolaborasi di antara para aktor yang terlibat (*stakeholder*), baik aktor pemerintahan maupun non-pemerintahan, haruslah mengacu pada kerja sama yang berkelanjutan.

Salah satu bukti keberhasilan *collaborative governance* untuk menangani banjir terungkap dalam riset Sihalo (2022) dan Heru Rochmansjah (2022) di Bandung dan Medan. Mereka menunjukkan bagaimana partisipasi perusahaan swasta sangat kontributif dalam mengurangi risiko banjir. Demikian pula diungkapkan Sunarharum (2016), bahwa *collaborative governance* bisa mengatasi berbagai hambatan di masyarakat, seperti: a) perbedaan persepsi antara pemerintah dengan masyarakat tentang penanganan banjir, b) keterbatasan literasi teknis dan pengetahuan masyarakat terdampak, dan c) keterbatasan kapasitas pemerintah dalam merumuskan kebijakan tepat sasaran untuk mitigasi. Penelitian yang dilakukan oleh (Satria et al., 2018) juga menunjukkan bahwa pihak swasta juga mampu memberikan kontribusi dan dukungan melalui teknologi dengan

cara membuat sistem pemantauan banjir berbasis web secara *realtime* untuk mengukur kedatangan dan kondisi banjir.

## **METODE**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di Kota Dumai, Provinsi Riau. Penelitian ini melihat beberapa titik yang melewati banjir yang ada di kota Dumai seperti Kecamatan Dumai Kota, Dumai Barat, Dumai Selatan dan Dumai Timur. Data penelitian ini diperoleh secara langsung melalui wawancara penulis pada beberapa dinas terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai, epala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai, Kepala UPT Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, Kepala Bidang Kerjasama Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Staff Hidrologi Balai Wilayah Sungai Sumatera III. Kemudian penelitian ini juga menghimpun literatur dari artikel, buku, situs resmi dan publikasi ilmiah. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara triangulasi data dengan merujuk pada pertanyaan penelitian dengan model *Collaborative Governace Regime* dari Emerson (2011). Model CGR memandang bahwa proses kolaborasi di antara para aktor yang terlibat (*stakeholder*), baik aktor pemerintahan maupun non-pemerintahan, haruslah mengacu pada kerja sama yang berkelanjutan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan *Collaborative Governance* Sebagai Upaya Penanggulangan Banjir Di Kota Dumai**

Adanya identifikasi dari penyebab banjir disusul dengan keterbatasan kewenangan dalam upaya penanggulangannya, maka penanggulangan banjir dengan pendekatan *collaborative governance* sangat diperlukan. *Collaborative governance* adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak ketiga, maupun dengan lembaga pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan yang sama serta mencapai tujuan bersama. Dengan pendekatan *collaborative governance*, setiap stakeholder yang mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung dapat terlibat dan ikut mengambil tanggung jawab dalam penanggulangan banjir

sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawab berdasarkan dengan kewenangan instansi masing-masing. Dengan itu, penanggulangan banjir dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, permasalahan banjir di Kota Dumai merupakan isu strategis yang harus diselesaikan secara kompleks. Beberapa upaya yang telah dilaksanakan untuk menanggulangi banjir agar meminimalisir tinggi, waktu, jumlah, dan luas genangan banjir tersebut juga belum berjalan secara optimal.

Salah satu penyebab upaya yang dilakukan adalah belum maksimalnya program yang telah dilaksanakan. Semisal nya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah berkerjasama dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera III untuk melakukan normalisasi sungai, pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman juga telah melakukan perbaikan drainase untuk melancarkan daerah aliran agar tidak tersumbat. Akan tetapi kegiatan tersebut hanya memberikan dampak secara jangka pendek mengingat banjir juga datang dari wilayah hulu. Pada bagian ini, peneliti akan menganalisa proses kolaborasi antar instansi pemerintah.

### **1. Dinamika Kolaborasi**

Di dalam proses kolaborasi, dinamika kolaborasi adalah bagian yang paling penting. Dinamika kolaborasi merupakan proses yang terjadi dari waktu ke waktu dimulai dengan mengidentifikasi masalah hingga kepada upaya, agenda ataupun solusi yang tepat untuk diimplementasikan. Emerson dalam *Collaborative Governance Regime* melihat dinamika proses kolaborasi sebagai siklus interaksi yang iteratif. Keterlibatan berprinsip merupakan keadaan ketika para stakeholder yang berbeda pandangan menemukan titik temu dan secara bersama mendefinisikan masalah, tujuan, serta kepentingan bersama (Emerson et.al., 2011). Pada dasarnya, kapasitas untuk melakukan tindakan bersama merupakan hal krusial dan merupakan tantangan utama kolaborasi, karena selalu terdapat perbedaan karakteristik dan kekuatan antar aktor.

Kejelasan prosedur dan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam bentuk legal-formal, pengaruh kepemimpinan, manajemen pengetahuan, serta manajemen sumber daya merupakan elemen-elemen yang mempengaruhi baik tidaknya kapasitas dari para aktor, sehingga menjadi mampu melakukan tindakan bersama. Namun, melihat penjelasan pada masing- masing elemen, terdapat pengaruh yang muncul dari komponen sebelumnya, yaitu penggerakan prinsip bersama, dan motivasi bersama. Kesimpulan akhir dari dinamika kolaborasi ini adalah baik tidaknya



dinamika ditentukan oleh tiga komponen, yaitu pergerakan prinsip bersama, motivasi bersama, dan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen. Dinamika yang ada berbentuk siklus, dimana masing-masing komponen saling mempengaruhi (begitu juga elemen-elemennya, dan tidak dipungkiri bahwa elemen tersebut dapat mempengaruhi elemen lintas-komponen).

Penanggulangan banjir di Kota Dumai menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai, akan tetapi karena penanggulangan yang dilakukan oleh Dinas tersebut belum optimal. Sehingga dengan itu diperlukan adanya keikutsertaan dari pihak lain untuk turut membantu penanggulangan banjir di Kota Dumai. Dari sana dibentuklah suatu pertemuan yang diinisiasi oleh walikota Dumai sebagai upaya untuk membahas mengenai percepatan penanggulangan banjir Di Kota Dumai. Pertemuan tersebut menjadi pertemuan rutin yang dihadiri oleh organisasi perangkat daerah Kota Dumai (diantaranya ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Perencanaan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai) bersama Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau. Dalam pertemuan tersebut dibahas masalah-masalah yang berkaitan dengan banjir serta dicarikan langkah-langkah pemecahannya.

Pertemuan tersebut dimulai sejak November 2021 dan rutin dilaksanakan setiap 1 bulan sekali baik secara langsung di Gedung Wan Ibrahim Dumai maupun pertemuan tidak langsung didukung dengan teknologi yang ada seperti *Zoom Meeting*, dan *diskusi WhatsApp group*. Pada pertemuan tersebut masing-masing instansi mengemukakan kewenangan yang mereka miliki sehingga para actor dalam kolaborasi tersebut mengetahui secara pasti peran, tugas, fungsi, dan tanggungjawab apa yang dapat mereka kerjakan untuk menanggulangi banjir di Kota Dumai.

Setelah mengetahui tanggungjawab masing-masing instansi, selanjutnya setiap *stakeholder* membuat aturan yang dipakai untuk memastikan kolaborasi berjalan lancar dan terarah, aturan yang diterapkan merupakan aturan yang telah dibahas bulir per bulir sampai setiap OPD menyepakati prosedur yang mereka tetapkan. Melalui proses tersebut akhirnya pada tanggal 7 november 2022 ditetapkan kesepakatan dengan bentuk perjanjian kerjasama antara Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dengan Walikota Dumai tentang Pembangunan



Strategis yang Tidak Dapat Dielakkan Berupa Pembangunan Embung dan Sarana Pendukungnya Dalam Rangka Mitigasi Bencana di Taman Wisata Alam Sungai Dumai, Kota Dumai, Provinsi Riau.

Adapun tujuan kerjasama tersebut berdasarkan pasal 1 pada perjanjian kerjasama adalah :

1. Membangun upaya mitigasi bencana banjir melalui pembangunan embung dan pengendalian debit air sungai;
2. Membangun upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui penyediaan sumber air;
3. Mendorong pemeliharaan dan penguatan fungsi TWA sungau dumai untuk menyelenggarakan destinasi wisata alam.

Perjanjian tersebut berlaku 10 tahun sejak ditandatangani dan sewaktu waktu dapat diputuskan apabila salah satu pihak atau keduanya melanggar kode etik yang telah ditetapkan.

## **2. Tindakan Dalam Kolaborasi**

Setiap tindakan, program, tupoksi hadir pada proses kolaborasi dapat terbentuk karena adanya kesadaran pemikira bahwa suatu tujuan akan sulit untuk dicapai tujuan jika hanya ada satu organisasi ataupun kelompok yang bekerja sendiri. Tindakan-tindakan dalam kolaborasi merupakan poin penting pada proses kolaborasi. Tindakan kolaborasi yang efektif harus diungkapkan secara tersirat dengan perumusan tujuan yang jelas dikarenakan akan sulit melakukan tindakan kolaborasi jika tujuan yang ingin dicapai dari kolaborasi itu sendiri tidak dibuat secara eksplisit. Setiap tindakan yang hadir dalam kolaborasi tentunya harus memperhatikan kesanggupan, kemampuan, serta dampak yang akan dihasilkan dari setiap tindakan yang akan dilaksanakan.

Pada saat pelaksanaannya prose kolaborasi memiliki bentuk yang sangat beragam seperti pemberdayaan masyarakat, penetapan perizinan, pengumpulan sumber daya, monitoring sistem/ praktik manajemen baru, dan lain sebagainya. Kemudian, hasil daripada tindakan ini secara langsung membawa dampak sementara yang mengarah kembali pada dinamika kolaborasi, dan dampak jangka panjang. Beberapa tindakan kolaborasi memiliki tujuan sangat luas seperti penentuan langkah strategis dalam isu/bidang kebijakan kesehatan. Namun banyak pula tindakan kolaborasi yang memiliki tujuan sempit seperti proyek pengumpulan dan analisis informasi

spesifik. Tindakan kolaboratif ada yang dapat dilakukan secara sekaligus oleh seluruh stakeholders ada pula yang hanya bisa dilakukan oleh stakeholder tertentu sesuai dengan kapasitas masing-masing *stakeholder*.

Selanjutnya dikarenakan setiap dinas mengetahui keterbatasan wewenang yang mereka miliki, maka dalam hal ini peran masing-masing OPD tidak lepas dari kewenangan yang dimiliki oleh dinas tersebut. Berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kersama tersebut di atas, setiap dinas mengambil peran masing-masing sesuai dengan kewenangan instansinya.

Dalam rencana kerja tersebut beberapa program usulan dalam rangka mendukung penanggulangan banjir diantaranya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai, program yang mereka jalankan adalah melakukan pembangunan dan pemeliharaan embung dan sarana pendukungnya, adapun turunan program tersebut diantaranya adalah : pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penataan bangunan dan lingkungannya. Selanjutnya pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, agenda yang mereka jalankan adalah dukungan pengelolaan keanekaragaman hayati serta melakukan pengelolaan sampah agar debit banjir dapat ditekan, sejalan dengan itu apabila pembangunan embung sudah selesai, maka nantinya pemerintah kota dumai akan menjadikan destinasi wisata yang akan dikelola oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata.

Dikarenakan pembangunan yang mereka lakukan berada di Taman Wisata Alam Sungai Dumai berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 154/Kpts-II/1990 tanggal 10 April 1990 seluas 4.712,50 ha maka perencanaan, monitoring, evaluasi serta pelaporan akan dilakukan langsung oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau.

### **3. Dampak dan Hasil Tindakan**

Dampak dalam CGR yang dimaksud adalah dampak sementara yang ditimbulkan selama proses kolaborasi. Karakteristik dampak ada yang diharapkan, yang tidak diharapkan, serta tidak terduga. Dampak yang diharapkan adalah "*smallwins*" yaitu hasil-hasil positif yang terus memberlangsungkan semangat para aktor. Sedangkan dampak yang tidak diharapkan seperti kendala-kendala dalam pelaksanaan kolaborasi. Dampak tidak terduga juga dapat muncul secara langsung maupun tidak pada proses kolaborasi. Berbagai dampak tersebut menghasilkan umpan balik atau *feedbacks*, yang kemudian di adaptasi oleh kolaborasi. Adaptasi yang dimaksud adalah

bagaimana kolaborasi menyikapi *feedback* dari masing-masing aktor yang ada. Adaptasi yang baik adalah yang sekiranya dapat dilakukan oleh seluruh aktor kolaborasi, artinya tidak ada pengaruh kepentingan organisasi di atas kolaborasi, sehingga menyebabkan terjadinya usaha mengambil mafaat kolaborasi secara lebih untuk kepentingan organisasi sendiri. Adaptasi harus berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan utama untuk dirubah di dalam kolaborasi, sehingga dari hal tersebut dapat menjaga kemajuan kolaborasi, dan hal ini dipengaruhi oleh keterbukaan dari kolaborasi itu sendiri.

Pada kolaborasi penanggulangan banjir yang dilakukan oleh pemerintah kota Dumai bersama Balai besar konservasi Sumber Daya Alam memberikan semangat kepada setiap instansi stakeholder yang terlibat untuk mulai memberikan setiap progressnya dalam proses kerjasama. Alhasil, untuk sementara waktu Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai mulai melakukan persiapan untuk pembangunan embung dalam rangka mitigasi bencana banjir. Sementara Dinas Lingkungan Hidup juga terus mengelola sampah agar tidak semakin menumpuk sehingga menyebabkan drainase penuh yang akan mempengaruhi genangan ketika hujan. Untuk hasil jangka panjang, maka dapat dilihat pada tahun ke 5 di proses kolaborasi. Hal ini juga diungkapkan oleh Tim Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam bahwa kerjasama tersebut belum membawa hasil yang signifikan dikarenakan perjanjian kerjasama tersebut baru disahkan di tahun 2022.

### **Faktor Penghambat *Collaborative Governance* Dalam Penanggulangan Banjir Di Kota Dumai**

1. Faktor anggaran. Anggaran menjadi jantung terhadap kegiatan sebab dengan adanya anggaran yang cukup untuk kolaborasi penanggulangan banjir tersebut maka tentunya setiap pihak lebih dapat memilih upaya yang paling maksimal untuk menanggulangi banjir. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Dumai sudah menganggarkan dana untuk proses kolaborasi maupun proses penanggulangan banjir. Akan tetapi anggaran tersebut masih belum cukup untuk membiayai proses kolaborasi dalam penanggulangan banjir
2. Faktor kultural atau budaya merupakan hambatan bagi kolaborasi karena adanya kecenderungan untuk ketergantungan pada pemimpin dan tidak berani mengambil terobosan atau risiko. Kolaborasi yang efektif mensyaratkan bagi aparatur pemerintahan

untuk memiliki keterampilan dan kesediaan berbaur dengan kemitraan melalui komunikasi yang fleksil. Faktor kultural ini erat kaitannya dengan budaya kerja sumber daya manusia yang terlibat kolaborasi dalam penanggulangan bencana di Kota Dumai. Kolaborasi juga gagal karena partisipasi dari kelompok kepentingan atau pemangku kepentingan lainnya selama ini sering kali masih dipandang bukan hal utama dan tidak diperlukan. Dalam hal ini masyarakat Kota Dumai cenderung apatis dalam menghadapi bencana banjir, terlebih lagi pembangunan yang dihadapkan sebagai upaya penanggulangan banjir tidak melibatkan masyarakat secara langsung. Ini memungkinkan gejala penolakan antara kelompok yang sadar lingkungan dengan pemerintah Kota Dumai. Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penghambat dalam kolaborasi ini dikarenakan ketika di lapangan banyak masyarakat yang protes terhadap pembangunan tersebut.

3. Belum adanya partisipasi pihak swasta. Partisipasi dari pihak swasta dalam menanggulangi banjir di Kota Dumai juga harus disertakan dalam menjalin kerjasama dengan pemerintah. Swasta dianggap mampu membantu menyelesaikan masalah yang sebelumnya tidak terselesaikan oleh pemerintah. Dalam hal penanggulangan banjir di Kota Dumai pihak swasta bisa diikutseratakan dalam pembangunan embung dan pengelolaan wisata. Objek wisata yang profesional dapat berjalan melalui koordinasi dari berbagai pihak dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat, dunia usaha, serta daerah melalui Pendapatan Asli Daerah. Dalam pelaksanaan kolaborasi ini, partisipasi dari berbagai pihak swasta baik perusahaan atau perorangan masih belum ada.

## **KESIMPULAN**

*Collaborative governance* sangat erat hubungannya dengan berbagai ragam kerjasama yang dilakukan antar stakeholders dalam penyelenggaraan pemerintahan juga dilakukan sebagai suatu upaya dan respon pemerintah dalam kegiatan penanganan masalah publik yang ada. Istilah kerja sama antar *stakeholders* yang melibatkan pemerintah, pihak swasta dan masyarakat inilah yang diartikan sebagai *collaborative governance*. Kolaborasi itu sendiri dimaknai sebagai upaya dalam pembentukan kerja sama, interaksi, serta kompromi antara beberapa elemen baik itu individu dengan individu, lembaga dengan lembaga maupun pihak individu dengan lembaga yang

kemudian terlibat dalam kolaborasi tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dan akan mendapatkan akibat atau manfaat. Kemudian Proses kolaborasi yang dilakukan dalam *Collaborative Governance* terhadap penanggulangan banjir di kota Dumai sudah terlaksana sejak 7 November 2022. Berdasarkan ketetapan tersebut dibentuklah perjanjian kerjasama antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau dengan Walikota Dumai dengan nomor : 660/1094.1/DPUPR dan nomor : PKS.2652/K.6/BTU/KUM.3/11/2022 tentang Pembangunan Strategis yang Tidak Dapat Dielakkan Berupa Pembangunan Embung Dan Sarana Pendukungnya Dalam Rangka Mitigasi Bencana Di Taman Wisata Alam Sungai Dumai, Kota Dumai, Provinsi Riau. Kemudian juga dibutuhkan kebijakan yang dapat mengatur ruang kolaborasi agar collaborative governance dalam menanggulangi banjir di Kota Dumai menjadi lebih maksimal, terutama bagi pihak pemerintah yang telah menandatangani kerjasama. Mengingat tupoksi yang telah ditetapkan hanya sebatas pembangunan fisik saja, maka dalam hal ini perlu di perhatikan pembangunan non fisik yang dapat dilaksanakan oleh masing-masing *stakeholder* yang terlibat dalam kerjasama tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bima Ade Prayoga Setiawan, Yulyana, E., & Aryani, L. (2021). Collaborative Governance Dalam Penanganan Banjir Di Desa Tanjungsari Kecamatan Cikarang Utara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* <https://jurnal.unibrah.ac.id/index.php/JIWP>, 7(1), 168–175. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5746176>
- Hermawan, C., Masjaya, & Burhanudin. (2019). Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang ( PUPR ) Dalam Pengendalian Banjir Di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu. *Ejournal Ilmu Pemerintah*, 7(1), 465–478.
- Maghfur, I. (2017). Manajemen Islam: Ruang Lingkup, Kajian Dan Perkembangan Ilmu Manajemen Islam Di Indonesia. *MALIA: Jurnal Ekonmi Islam*, 9, 1–16.
- Marchezini, V., Porto De Albuquerque, J., Pitidis, V., Rudorff, C. De M., Lima-Silva, F., Klonner, C., & Martins, M. H. Da M. (2022). Flood Risk Governance In Brazil And The UK: Facilitating Knowledge Exchange Through Research Gaps And The Potential Of Citizen-Generated Data. *Disaster Prevention And Management: An International Journal*, 31(6), 30–

44. <https://doi.org/10.1108/DPM-01-2022-0016>

- Pahleviannur, M. R. (2019). Edukasi Sadar Bencana Melalui Sosialisasi Kebencanaan Sebagai Upaya Peningkatan Pengetahuan Siswa Terhadap Mitigasi Bencana. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 29(1), 49–55. <https://doi.org/10.23917/Jpis.V29i1.8203>
- Philia Christi Latue, Juan Steiven Imanuel Septory, Glendy Somae, H. R. (2023). Pemodelan Daerah Rawan Banjir Di Kecamatan Sirimau Menggunakan Metode Multi-Criteria Analysis (MCA). *18*, 20–23.
- Pradika, M. I., Giyarsih, S. R., & Hartono, H. (2018). Peran Pemuda Dalam Pengurangan Risiko Bencana Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 24(2), 261. <https://doi.org/10.22146/Jkn.35311>
- Rahayu, H. P., Haigh, R., Amaratunga, D., Kombaitan, B., Khoirunnisa, D., & Pradana, V. (2020). A Micro Scale Study Of Climate Change Adaptation And Disaster Risk Reduction In Coastal Urban Strategic Planning For The Jakarta. *International Journal Of Disaster Resilience In The Built Environment*, 11(1), 119–133. <https://doi.org/10.1108/IJDRBE-10-2019-0073>
- Rahmat, H. K., & Alawiyah, D. (2020). Konseling Traumatik: Sebuah Strategi Guna Mereduksi Dampak Psikologis Korban Bencana Alam. *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani*, 6(1), 34-44.
- Rahmat, H. K., Kasmi, & Kurniadi, A. (2020). Integrasi dan Interkoneksi Pendidikan Kebencanaan dan Nilai-Nilai Qur'ani dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah Menengah
- Rahmat, H. K., Syarifah, H., Kurniadi, A., Putra, R. M., & Wahyuni, S. W. (2021). Implementasi Kepemimpinan Strategis Guna Menghadapi Ancaman Bencana Banjir Dan Tsunami Di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Manajemen Bencana*, 7(1), 1–18. <https://doi.org/10.33172/Jmb.V7i1.627>
- Satria, D., Yana, S., Munadi, R., & Syahreza, S. (2018). Design Of Information Monitoring System Flood Based Internet Of Things (Iot). *Emerald Reach Proceedings Series*, 1, 337–342. <https://doi.org/10.1108/978-1-78756-793-1-00072>

- Setiawan, R. (2019). Colaborative Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Dalam Menaggulangi Kebakaran Lahan Di Kota Dumai. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 5(2), 62–68. [https://doi.org/10.25299/wedana.2019.vol5\(2\).4677](https://doi.org/10.25299/wedana.2019.vol5(2).4677)
- Skouloudis, A., Leal Filho, W., Deligiannakis, G., Vouros, P., Nikolaou, I., & Evangelinos, K. (2023). Coping With Floods: Impacts, Preparedness And Resilience Capacity Of Greek Micro-, Small- And Medium-Sized Enterprises In Flood-Affected Areas. *International Journal Of Climate Change Strategies And Management*, 15(1), 81–103. <https://doi.org/10.1108/IJCCSM-09-2022-0122>
- Sunarharum, T. M. (2016). Collaborative Planning For Disaster Resilience: The Role Of Community Engagement For Flood Risk Management [Queensland University Of Technology]. <https://eprints.qut.edu.au/101560/>
- Sunarharum, T. M., Sloan, M., & Susilawati, C. (2014). Re-Framing Planning Decision- Making: Increasing Flood Resilience In Jakarta. *International Journal Of Disaster Resilience*
- Tampubolon, K. (2018). Aplikasi sistem informasi geografis (SIG) sebagai penentuan kawasan rawan banjir di Kota Medan. *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, 6(2), 63–68.
- Utama, D. B., Prewito, H. B., Pratikno, H., Kurniadi, Y. U., & Rahmat, H. K. (2020). Kapasitas Pemerintah Desa Dermaji Kabupaten Banyumas Dalam Pengurangan Risiko Bencana. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(3), 591–606.